

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat yang ditandai dengan mudahnya berbisnis di era digital. Perkembangan dunia usaha ini menyebabkan persaingan tajam, oleh sebab itu perusahaan harus mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus berkembang sesuai dengan visi, misi dan tujuannya.

Perkembangan bisnis menyebabkan perusahaan akan melakukan berbagai strategi dan usaha untuk memenangkan persaingan diantara perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Untuk melakukan usaha tersebut, perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar baik berupa dana yang berasal dari modal saham maupun dari pihak eksternal yaitu utang. Dalam memperoleh dana tersebut, tentunya akan ada biaya yang digunakan untuk bunga yang disebut dengan biaya utang.

Kreditur selaku pihak eksternal, sebelum meminjamkan dana harus memperhatikan atau mempertimbangkan resiko-resiko yang akan dihadapi. Maka dari itu, selaku kreditur harus mengetahui tinggi rendahnya resiko dari kondisi pasar perusahaan tersebut. Berikut adalah hasil penelitian dari Survey Jetro mengenai beberapa negara yang memiliki resiko tinggi:

**Tabel 1.1.**  
**Resiko Ekonomi Dalam Beberapa Negara**

<b>Negara</b>	<b>Infrastruktur yang belum memadai</b>	<b>Belum berkembangnya system yang legal dan masalah dalam aplikasi hukum</b>	<b>Tinggi atau kenaikan biaya tenaga kerja</b>	<b>Resiko dan masalah pajak</b>	<b>Kesulitan tenaga kerja</b>
<b>China</b>	11.6%	45.1%	49.5%	23.2%	34.1%
<b>Thailand</b>	10.5%	6.5%	30.1%	5.6%	12.7%
<b>Malaysia</b>	10.0%	6.8%	15.9%	4.9%	9.3%
<b>Indonesia</b>	36.4%	27.2%	21.0%	13.7%	22.1%

<b>India</b>	56.8%	29.6%	7.9%	15,0%	23.7%
<b>Myanmar</b>	60.4%	39.3%	3.3%	9.3%	9.6%

Sumber: Survey JETRO, 2013

Berdasarkan hasil penelitian, suatu negara dikategorikan memiliki resiko tinggi apabila memiliki persentase melebihi 20%. Dilihat dari infrastruktur Indonesia beresiko tinggi sebesar 36.4%, legal sytem di Indonesia yang masih sangat lemah yaitu 27.2%, masalah biaya tenaga kerja yang jauh lebih besar dibandingkan dengan India dan Myanmar sebesar 21.0%, 13.7% untuk masalah dan risiko pajak, serta kesulitan tenaga kerja sebesar 22.1%. Indonesia memiliki resiko yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang memiliki rata-rata persentase resiko dibawah 20%. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia termasuk negara *High Risk*.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan bahwa bunga kredit di Indonesia mencapai 10%, sementara di Malaysia hanya 2%. Sangat jelas bahwa Indonesia yang memiliki risiko investasi yang tinggi maka tingkat bunga yang didapat pun jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia, berbeda dengan Malaysia dengan tingkat risiko yang rendah akan mendapatkan tingkat bunga yang rendah pula (detik Finance, 25 Sept 2017). Apabila suatu negara termasuk negara *High Risk*, maka biaya hutang yang ditetapkan oleh kreditur pun akan semakin tinggi.

Sebagian perusahaan menganggap bahwa penggunaan hutang dirasa lebih aman daripada menerbitkan saham baru. Terdapat empat alasan mengapa perusahaan lebih suka menggunakan hutang daripada saham baru, yaitu (1) adanya manfaat pajak atas pembayaran bunga, (2) biaya transaksi pengeluaran hutang lebih murah daripada biaya transaksi emisi saham baru, (3) lebih mudah mendapatkan pendanaan hutang daripada pendanaan saham, (4) kontrol manajemen lebih besar adanya hutang baru daripada saham baru (Bhoraj dan Sengupta dalam Pratama dkk, 2017).

Padahal, dalam perolehan utang perusahaan membutuhkan biaya, yaitu biaya utang (*cost of debt*). Fabozzi dalam Simanjuntak dan Sari (2014) medefinisikan *cost of debt* sebagai tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditor saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, biaya hutang adalah

besarnya tingkat keuntungan yang diminta oleh investor, dan besarnya tingkat keuntungan ini sama dengan tingkat bunga yang menyamakan *present value* penerimaan di masa datang dan pembayaran pokok pinjaman (Simanjuntak dan Sari, 2014). Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga. Beban bunga akan menyebabkan pajak penghasilan berkurang (Kholbadalov, 2012).

Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen *et al.*, 2010).

*Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Pohan, 2013). Upaya untuk memperkecil pajak seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan substitusi dari penggunaan hutang. Perusahaan lebih menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang akan disetorkan kepada Negara dibandingkan meningkatkan penggunaan hutang sehingga itu akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit karena penggunaan utang yang tidak tinggi, yang dampaknya akan mengurangi *cost of debt* (Lim 2010; Santosa dan Kurniawan, 2016).

Suatu entitas tidak hanya harus bertanggung jawab kepada pemerintah terkait pembayaran pajak, namun juga harus bertanggung jawab dan terbuka kepada publik. Salah satu bentuk transparansi yang lebih luas kepada publik adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Pengertian *corporate governance* adalah “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan” (FCGI dalam Soekrisno Agus, 2012).

Penelitian Asbaugh dalam Kholbadalov (2012) membuktikan bahwa perusahaan dengan GCG yang kuat ternyata memiliki peringkat kredit (*credit ratings*) yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan GCG yang lemah. Peringkat kredit akan mempengaruhi persepsi para kreditor dan calon kreditor atas kredibilitas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara keseluruhan. Dengan demikian jelas bahwa dengan rating yang tinggi, perusahaan dengan GCG yang kuat akan menikmati biaya hutang (*cost of debt*) yang lebih rendah.

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo dalam Sandy dan Lukviarman, 2015). Rebecca dan Siregar (2012) berpendapat bahwa investor institusional, yang juga berperan sebagai fidusiari, memiliki insentif yang lebih besar untuk memantau manajemen dan kebijakan perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh Collins dan Huang (2010) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap biaya ekuitas perusahaan..

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Kadarsih, 2015). Hasil penelitian Shuto dan Kinagawa (2010) dan Aripin (2014) menunjukkan bahwa *debtholders* meminta *risk premium* yang lebih rendah pada perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial besar.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Agoes dan Ardana, 2013). Hasil penelitian Mission dan Piera (2007) dan Juniarti (2009) menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka biaya utang perusahaan semakin kecil. Adanya

komisaris independen diharapkan mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan dewan komisaris.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Kurniawan (2016), yang berjudul “Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014”. Beda penelitian ini dengan replikasi adalah peneliti menambah 3 variabel independen, yaitu: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen yang merupakan wujud mekanisme *good corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Kurniawan (2016), menunjukkan hasil bahwa tax avoidance berpengaruh positif terhadap cost of debt. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Marcelliana (2014) dan menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian Santosa dan Kurniawan (2016). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Novianti (2014) yang menunjukkan bahwa tax avoidance tidak berpengaruh positif terhadap cost of debt. Selain itu, penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Erniawati (2014) yang menunjukkan bahwa tax avoidance berpengaruh negatif terhadap cost of debt. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Sun (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan biaya utang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Sentosa (2009) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian, karena penelitian ini sudah banyak dilakukan namun dengan hasil yang tidak konsisten maka, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai tax avoidance, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH TAX AVOIDANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP COST OF DEBT (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2016)”**.

## 1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari agar pembahasan ini tidak menyimpang dari materi pokoknya, penelitian ini mempunyai batasan ruang lingkup yaitu:

1. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh *tax avoidance* dan *good corporate governance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.
2. Variabel dependen yaitu *cost of debt*.
3. Variabel independen yaitu *tax avoidance* dan *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen.
4. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*.
5. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang sudah diaudit oleh auditor independen dan telah dipublikasikan secara lengkap di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah aktivitas *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *cost of debt*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *cost of debt*?
4. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *cost of debt*?

## 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt*.

2. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *cost of debt*.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *cost of debt*.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *cost of debt*.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Praktis

Sebagai bahan acuan dan landasan bagi para pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama di masa mendatang dan untuk mengembangkan penelitian di bidang akuntansi.

2. Teoritis

Memberikan referensi terhadap investor dan kreditor dalam kriteria pemberian pinjaman, serta pelaku pasar akan pentingnya identifikasi terhadap karakteristik perusahaan dan pentingnya kualitas auditor.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **Bab I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II: LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis.

### **Bab III: METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

### **Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi, statistik deskriptif, pengujian dalam analisi model regresi dan pembahasan hasil pengujian hipotesis.

### **Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, keterbatasan dan saran untuk penelitian yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**